BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubugan internasional merupakan suatu hubungan yang melintasi batas suatu negara yang mana segala bentuk interaksi mencakup hubungan luar negeri antar negara suatu dengan negara yang lain, maka Kusumowidjojo dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional secara harfia, sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan aspek yang dominan. Sebagai aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedur dari berbagai kepentingan *(interest)* (Sitepu, 2011:20).

Bob Sugeng Hadiwinata Dalam bukunya Hermawan "*Transformasi dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional"* menyatakan bahwa dari sisi isu, pada awal kemunculan akhir abad ke-19 hubungan internasional lebih mefokuskan pada isu seputaran masalah peperangan dan perdamaian *(war and peace)*, maka pada perkembangan selanjutnya Hubungan Internasional lebih merambah ke persoalan yang menyakut kerjasama ekonomi antar negara, upaya untuk memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antar kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar

negara *(transnational crime)*, upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya.

Kombinasi antara faktor perubahan struktur politik global, teknologi, dan globalisasi telah mengubah secara substansi kerakter masalah keamanan dan ekonomi global. Makin merebaknya konflik internal (separatisme, konflik etnis keagamaan, dan lain-lain) yang melibatkan kelompok militian, ekstrimis, chauvinis, mafia dan sebagainya telah membuat masalah peperangan dan perdamaian tidak lagi didominasi oleh negara (Hermawan, 2007:1).

Hubungan Internasional Menurut Martin Wight, ada tiga tradisi dalam yang mencerminkan dalam disiplin Hubungan Internasional yakni:

Yang pertama, pilar yang disebut "sistem internasional" (international sytem), yang merefleksikan pandangan Realisme bahwa sistem ini dibentuk oleh "negara" yang saling berinteraksi secara terus meneurs sehingga interaksi tersebut mempengaruhi perilaku masing-masing negara. Secara ontologis keberadaan negara tidak lepas dari kebutuhannya untuk saling berinteraksi satu sama lain karena tidak ada negara yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri *(autarkis)*. Maka, intarksi antar negara dalam bentuk kerjasama maupun konflik merupakan realitas yang mengerakan sistem internasional berdasarkan pada dorongan untuk mencapai kepentingan dengan menghalalkan segala cara. Karena fokus perhatiannya pada negara maka pilar ini dapat disebut juga sebagai "pilar realisme" dalam hubungan internasional.

Yang kedua, dienal dengan sebutan "masyarakat internasional" (international society) yang menekankan pada proses intitusionalisasoi dan

kondifikasi dari norma-norma, aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama antar negara untuk kemudian dijadikan prinsip dasar pergaluan internasional. Didasaran pada upaya Hugo Grotius untuk membentuk semacam aturan pergaulan internasional, pilar ini merupakan idaman para pemikir mazhab inggris (yang sangat berpengaruh sejak dekade 1950-an hingga 1970-an) karena mereka yakin bahwa kerjasama antara negara dan perdamaian dapat ditegakkan apabila terbentuk semacam "masyarakat internasional" dimana setiap negara anggotanya patuh pada segala norma, aturan dan ketentuan yang disepakati bersama.

Yang ketiga, disebut dengan istilah "masyarakat dunia" *(world society)* yang menempatkan individu, organisasi-organisasi non negara, dan gerakan sosial sebagai aktor dalam studi Hubungan Internasional. Revolusionisme pada dasarnya adalah upaya universalis-kompolitanis (aktivis HAM, lingkungan hidup, feminis, dan semacamnya) untuk menerapkan standar moralitas tertentu agar menciptakan kesetaraan gender, persamaan hak, konservasi lingkungan hidup, dan sebagainya. Menilik gagasannya yang kosmopolitan dan kadangkala utopia maka pilar ini dilandasi oleh pemikiran Imanuel Khant tentang liberal kosmopolitanisme. Sama halnya seperti Kant, tujuan kamu revolusionis adalah untuk menciptakan perdamaian abadi *(perpetual peace)* dengan memberlakukan moralitas yang berpotensi untuk meniadakan konflik dan peperangan. Dengan demikian pilar ketiga ini juga disebut dengan istilah "revolusionerisme" atau "pilar kantanisme".

Hubungan internasional di definisikan sebagai stufi tentang interaksi antara bebarapa aktor yang berpatisipasi dalam politik internasional, yang

meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar hubungan internasional adalah memperlajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional (Oed, 1995:28)

2.1.2 Politik Luar Negeri

Dalam uraian terdahulu mengenai batas-batas dan lingkup studi Hubungan Internasional dengan jelas diberikan pengertian hubungan Internasional secara defenisional dan secara harfiah bisa diartikan merupakan hubungan antarnegara atau hubungan antarbangsa yang meliputi semua hubungan-hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketata negaraan. Hubungan internasional sering didistribusikan untuk pengunaan terminologi hubungan antar negara untuk menandai semua hubungan tesebut.

> "Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatir semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri juga merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Hubungan internasional juga dapat di sebagai suatu bentuk kebijaksanaan luar negeri atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada diluar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah interaksi negara-negara. (Sitepu, 2011 : 177)

Interaksi negara itu dapat berlangsung dalam sistem internasional, dimana ternyata negara tetap masi merupakan aktor utama dalam hubungan internasional maka dengan demikian huungan internasional merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksi itu pula setiap negara

berupaya menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijakan politik luar negeri masing-masing.

Seperti yang dikemukakan oleh Robert Koehane & Joseph Nye (1972), bahwa secara internasional para ilmuan dan praktisi politik internasional yang memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah hubungan antar bangsa atau hubungan antarnegara. Negara dalam konteks ini dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang sifat otonom. Negara juga merupakan unit dasar dalam politik luar negeri dari berbagai negara yang pada gilirannya akan membentuk suatu pola perilaku. Pola perilakunya inilah yang mencerminkan koneksitasnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan lur negerinya yang diartikulasikan oleh pemerintah denga segala konsekuensinya.

Ini adalah suatu proses pembuatan keputusan atau kebijakan luar negeri atau mengartikulasi kebijakan-kebijakan yang pada prisnsipnya dipengaruhi oleh suasana dalam negeri(domestik) dan suasana internasional dan kesemuannya ini diarahkan kepada tujuan atau sasaran politik luar negeri itu sendiri, didasarkan pada dua unsur utama. Dua unsur utama tersebut adalah:

a. Tujuan nasional *(natinal objektives);* dan
b. Sarana *(means)* untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan nasional atau lebih tepatnya dikatakan sebagai sarana politik luar negeri. Sedangkan yang berkaitan dengan sarana politik luar negeri adalah yang hubungannya dengan instrumen-intrumen atau melalui mana pelaksanaan politik

luar negeri itu dilakukan. Dalam bagian ini diuraikan lebih lanjut mengani unsur politik luar negeri itu.

Politik luar negeri pada umumnya memiliki tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai *(foreign policy objektive)* yang terkadang melebihi kepentigan nasionalnya. Dalam hal ini tergantung kepada si pembuat kebijakan atau keputusan politik luar negeri yang bersangkutan dan dalam hal ini, sering terjadi perbedaan-perbedaan, terutama didalam prespektif, orientasi dan peranan orientasi politik luar negerinya.

> "Politik luar negeri adalah sebagaimana suatu citra keadaan negara masa depan dan kondisi masa depan yang pemerintah melalui pembuat kebijakan perorangan bercita-cita untuk membawa pengaruh pengaruh ke luar negeri dan dengan mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain (Holstin, 1983: 4-5, 124).

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu bisa saja dalam bentuk yang nyata, seperti misalnya tujuan politik luar negeri Indonesia, adalah untuk memperjuangkan kembalinya wilayah papua.

Maka selanjutnya pandangan Holstin, menguraikan berbagai kemungkinan untuk dapat memahami struktur dan tujuan politik luar negeri yang pada dasarnya adalah mewakili, menegakan, membela memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasional dalam forum internasional yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional. Kepentingan nasional menjadi prinsip dalam kerangka pelaksanaan politik luar negeri.

(Holstin 1983: 175) membuat suatu skema untuk mengambarkan dan klasifikasi ruang lingkup tujuan politik luar negeri dengan mengunakan tiga kriteria yaitu:

a. nilai yang berada pada tujuan atau tingak nilai yang mendorong pembuat kebijakan/keputusan dan pengunaan sumber daya negara untuk mencapai tujuan itu;
b. unsur waktu untuk mencapai tujuan;
c. jenis tuntutan tujuan yang dibebankan kepada negara lain ke dalam sistem.

Berdasarkan kepada kriteria tersebut, kita dapat membentuk kategori tjuan-tujuan politik luar negeri itu sebagai berikut.

1. Nilai dan kepentingan "inti" *(coreobjektive)* yang mendorong pemerintah dan bangsa untuk melakukan eksistensinya dalam rangka mempertahankan atau memperluas tujuan sepanjang bisa dilakukan dengan tanpa menekan negara lain;
2. Tujuan-tujuan antara (jangka menegah) biasanya menekankan tujuannya pada negara lain (komitmen untuk mencapai tujuan ini secara sunguh-sunguh dan biasanya tujuan ini memiliki beberapa pembatasan);
3. Tujuan jangkan panjang biasanya jarang memiliki batasan waktu untuk mencapainya.

Sasaran yang pragmatis sebagaiman yang dirancang, menurut pandangan K.J. Holsin, yakni dengan mengaitkannya dengan kepentingan indonesia dengan cara sebagai berikut: dalam kategori yang pertama, dibedakan antara sasaran yang spersifik, misalnya penyelesaian friksi perbatasan antara Indonesia dengan PNG dan sasaran umur misalnya, pengegas umu sikap indonesia terhadap masyarakat kawasan pasifik.

Menurut (Gibson, 1986), politik luar negeri adalah rencana konperhensif yang dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalama untuk di jadikan bisnis pemerintahan dengan negara lain. politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa. Selaras dengan pengertian ini, plitik luar negeri suatu bangsa dapat diartikan sebaga satu rangkaian fundamental dari prinsip-prinsip yang memberikan petunjuk bagi diplomati dalam mengatur hubungan negaranya dengan negara lain dan organisasi internasional.

Oleh karena itu, dalam pandangan wiryono (2008), politik luar negeri suatu bangsa harus memerhatikan harapan negara lain dan entitas internasional serta standar mapan internasional abgi perilaku nasional suatu negara. Tetapi sumber politik suatu bangsa haruslah bertumpuh pada keadaan bangsa itu sendiri serta politik domestiknya dan kabijakan-kebijakan yang diputuskannjya. Dengan demikian politik luar negeri merupakan pecerminan, perluasan, dan kelanjutan politik domestik.

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi memiliki kaitan erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luara negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi terlatih. Dibanyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh dan Staf Deplu. Pelaksanaan diplomasi bilateral dan ultilateral serta kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yag ditempatkan di luar negeri dan didalam organisasi internasional.

Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri, tetapi kedua-duannya merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mecapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang di ambilnya (Aelina, 2010:2-3).

S.L. Roy mencoba mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai defenisi mengenai diplomasi. Menurutnya, dari defenisi-defenisi tersebut, beberapa hal tampak jelas bahwa:

1. unsur pokok diplomasi adalah negosiasi
2. negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara
3. tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilkasanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional maupun tujuan utama diplomasi
4. teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk melakukan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian.
5. diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara.
6. diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara.
7. diplomasi tidak dapat dipisahkan dari perwakilan negara (Roy, 1991:2-3)

Mengenai istilah diplomasi yang telah diberikan dalam berbagai definisi dan argument oleh para diplomat terkemuka serta para pakar dalam hubungan internasional dan diplomasi mungkin dianggap belum memadai meskipun telah mencakup berbagai aspek, Sir. Ernedt Satow, dalam bukunya meberikan defenisi sebagai berikut:

> “Diplomasi adalah pengunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urutan tersebut dilakukan antara dengan negara cara damai”.

Teori sistem dapat dipakai untuk menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh Jarvis, sebuah sistem dibentuk oleh kenyataan yang berubah di suatu bagian sistem serta menyebabkan terjadinya perubahan di bagian lain. Perubahan dalam kebijakan luar negeri akan merubah praktik diplomasinya. Kondisi ini akan mengarah pada implikasi sistem yang berat: konsekwensi tingkah laku sering kali tidak diharapkan atau disengaja oleh para aktor diplomasi.

Karakteristik kedua dari sistem adalah pengkondisian. Kebijakan luar negeri akan dirancang sesuaidengan dengan kemampuan yang dimiliki oleh staf diplomatiknya. Suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri. Hubungan antara dua aktor akan tergantung sebagaian pada hubungan di antara aktor-aktor tersebut dan aktor lainnya yag terdapat didalam sistem. Hal ini berarati bahwa apakah aktor-aktor akan bekerjasama atau menentang satu sama lain akan dipengaruhi oleh aktor di luar hubungan bilateral mereka.

Lebih jauh lagi, sistem saling terkait satu sama lain; kejadian suatu wilayah akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Perubahan-perubahan dalam hubungan antara dua negara akan mengarah pada perubahan didalam kebijakan luar negeri negara lain. Didalam sistem kebijakan dan kejasian bercabang-cabang dab meluas melalui waktu dan tempat yang jauh.

Keberhasilan atau kegagalan diplomasi akan tergantung tidak hanya menajemen hubungan internasional yang dilaksanakan oleh para diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi juga tergantung pada arahan dari Menlu atau Direktur Jenderal. Cohen secara khusus mecatat bahwa pengaruh diplomasi terhadap kebijakan luar negeri di negar-negara yang berkembang yang menganut sistem pemerintahan yang terpusat, eksekutif pusat yang kuat, birokrasi yang relatif lemah dan dasar pembentukan kebijakan yang sempit. Kepala negara lebih senang melakukan negosiasi secara langsung atau melakukan diplomasi personal; dalam hal lingkungan dekat Presiden (emisaries) seringkal bukan berasal dari kalangan diplomatik, sering kali diutus untuk melakukan tugas-tugas diplomatik. Tidak adanya kegiatan pengambilan keputusan yang interaktif cenderung memperlemah peran birokrasi dan khusunya departemen Luar negeri (Warsini, 2012: 13-14).

Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Tujuan persuasif antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawan.

Sukawarsini dalam bukunya *"Diplomasi antara Teori & Praktik"* bahwa isu-isu yang relevan dalam diplomasi moderen yang salah satunya isu-isu tradisional (pembatasan negara, keamanan, kekuasaan) diplomasi tradisonal mengasumsikan bahwa hubungan internasional dikendalikan oleh negara-negara berdaulat.

Dalam konteks ini, diplomasi dilaksanakan oleh diplomat yang menegosiasikan trakta-traktat, merancang kebijakan-kebijakan dalam perdagangan dan membuat kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk mepertahankan kekuasaanterhadap negara-negara yang lebih lemah dan untuk mempertahankan keseimbangan yang memiliki status yang sama. Diplomasi tradisional memfokuskan perhatian pada pengarahan kekuatan untuk mengadakan pendekatan, sambil, mempercayai bahwa kekuasaan adalah komoditas yang perlu diperjuankan, sehingga semakin banyak yang dimiliki oleh satu pihak, menyebabkan berkurangnya pemilikan pihak lain.

Diplomat-diplomat tradisional tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan peta dunia. Tugas-tugasnya didasarkan pada asumsi bahwa mesyarakat manusia diorganisasikan dalam kelompok-kelompok negara berdaulat yang ditandai dengan adanya batasan-batasan wilayah yang tegas. Diplomasi seperti ini lebih mudah dijalankan melalui pendekatan geografi dari pada memakai cara lain. Diplomasi tradisional akan semakin berkurang fusngsinya ketika melihat dunia di mana wilayah-wilayahnya tidak lagi merupakan prinsip-prinsip yang telah didefinisikan (Warsini, 2012:22).

2.1.4 Organisasi Internasional

Hubungan kerjasama antar Negara secara internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya Hubungan diplomasi antar negara sebagai bentuk perjanjian internasional juga merupakan salah satu wujud dari terjadinya aktifitas kerjasama hubungan internasional. Selain itu, bentuk kerjasama internasional

lainnya dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional selain Negara.

Organisasi Internasional merupakan konsep yang dibawah oleh prespektif liberalisme. Prespektif liberalisme, yamg memandang bahwa hakikat manusia adalah baik dan percaya bahwa perdamaian abadi *(perpetual peace)* dapat diwujudkan melalui kerjasama. Persepektif ini mengangap bahwa masalah didunia internasional dapat diatasi dengan membentuk suatu kerjasama dan dengan mendirikan organisasi intenasional (Hennida, 2015:7).

Sedangkan menurut Evans dan Newnham dalam Herninda mendefinisikan bahwa:

> "Organisasi internasional sebagai suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antara aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Perjanjian yang mendasari terbentuknya suatu organisasi internasional pada umumnya berbentuk multilateral, karena anggota organisasi internasional pada umumnya lebih dari dua negara (Hennida, 2015:7)".

Teuku May Rudy juga dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional memaparkan pengertian Organisasi Internasional sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinamubungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuantujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda." (Rudy, 2005:3)".

Organisasi Internasional awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak dan eksklusivatas teritorialnya. Sedangkan subjek hukum selain negara tidak memiliki hak hak tersebut, misalnya organisasi internasional yang

diciptakan oleh negara-negara. Organisasi internasional ini hanya memiliki hak-hak dan kewajiban konvensi internasional. Dalam masyarakat modern, organisasi merupakan suatu kebutuhan setiap anggota masyarakat baik untuk skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Organisasi internasional adalah sebuah fenomena baru dalam waktu yang dihormati di dunia politik. Pertama kali munculnya organisasi internasional pada abad ke-19 dan menjdai kian penting selama abad ke-20. Organisasi internasional mempunyai fungsi seperti suatu negara modern, yaitu mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan HTN sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusional internasional.

Organisasi internasional telah menyentuh beberapa dari disiplin ilmu, khususnya hubungan internasional, hukum internasional dan ekonomi politik internasional. Selain itu diplomatik dan sejarah internasional juga menerangkan bahwa kelahiran dan pertumbuhan setiap individu dalam organisasi internasional di abad 19 dan 20. Jadi intisari penelitian dan pengajaran yang relatif baru ini adalah unsur struktural hubungan internasional yang lebih utama dalam mendapatkan perhatian (Rittberger & Zangi, 2006: 3).

2.1.4.1 Definisi Organisasi Internasional

Mandalangi dalam bukunya yang berjudul *"Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*" dapat dijumpai pengertian organisasi internasional yang substansinya bekisar masalah pengertian organisasi internasional dalam arti luas

dan organisasi internaional dalam arti sempit yang dituangkan dalam beberapa defenisi berikut ini :

> "Organisasi internasional mempunyai arti ganda, dalam arti luas dan sempit. Organisasi internasional dalam arti luas menunjukan pada setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional) baik yang bersifat publik maupun privat sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi yang bersifat publik" (Mandalangi, 1986:1).

Sedangkan menurut Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya "*Hukum Organisasi Internasional"* mengatakan bahwa :

> "Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul" (Kusumo, 1990 : 10).

Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau c*harter.*

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya *"Internasional Organization"* menyatakan bahwa :

> "Organisasi internasional adalah suatu struktural formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan persetujuan antara sedikit dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan-kepentingan bersama dan membangun kerja sama yang luas dengan institusi-institusi lain, walaupun tidak termasuk kepada lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan" (Archer, 1983 : 6).

2.1.4.2 Tujuan Organisasi Internasional

Organisasi internasional mempunyai tujuan yang dapat dilihat dalam ulasan Colombis dan Wolfe dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional* karangan T. May Rudy adalah :

1. Regulasi hubungan antarnegara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
2. Mencegah perang meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional *conflict management.*
3. Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerja sama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.
4. *Collective Security* atau *Collective Deffence* (aliansi) sekelompok negata untuk menghadapi ancaman eksternal bersama.

Sedangkan menurut Field dan T. May Rudy, tujuan organisasi internasional baik IGOs maupun INGOs dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu :

1. Untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena internasional (global dan regional).
2. Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya.
3. Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negaranegara anggotanya (Field & Rudy, 2005 : 31).

2.1.5 Separatisme

Gerakan separatisme muncul itu karena faktor ideologis yang sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari

ideologi alternatif. Dekadensi moral dan pembusukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi buah dari tatanan masyarakat sekular telah mengecewakan berbagai pihak. Mereka pada akhirnya mencari ideologi alternatif yang lebih baik, lebih adil, dan lebih mensejahterakan. Runtuhnya nilai-nilai kemuliaan manusia menjadi nilai-nilai materialistik dan individualistik, imperialisme gaya baru yang dibungkus dengan label globalisasi, yang merupakan strategi dan kandungan ideologi kapitalis yang masih eksis saat ini, juga membuat orang kecewa dan mencari ideologi lain. Penemuan atas ideologi baru tersebut kemudian turut mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan gerakan separatisme.

Secara teoritis, separatisme subur di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, pembangunan terbengkalai, kaya akan sumber daya alam, dan kuatnya perasaan perbedaan etnis dengan etnis yang berkuasa. Berbagai pandangan tentang penyebab munculnya separatisme telah lama kita ketahui, dan para pengambil kebijakanpun sudah merumuskannya, dalam langkah-langkah aturan dan peraturan. Saparatisme di berbagai Negara muncul karena berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik, penggunaan kekerasan yang melanggar HAM, dan berbagai hal lainnya yang kurang lebih sama

(https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article_Diakses 30 Nov 2017)

2.1.5.1 Definisi Gerakan Separatisme

Defenisi Gerakan Separatisme menurut Julius Pour dalam bukunya *"Dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS"* memaparkan bahwa:

> "Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius (Pour 2008 : 3)."

> "Gerakan Separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri) Separatisme selalu dipahami sebagai gerakan yang bersifat politis untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (Pour, 2008 : 4)."

Sedangkan menurut Ikrar Nusa Taluhelu : Gerakan separatisme muncul akibat berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahtraan, kebijakan politik dan pengunaan kekerasan yang melangar HAM sehingga timbuk pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan diri. (Taluhelu, 2000:22)

George Larson dalam bukunya "Penumpasan Pemberontakan Separatisme Di Indonesia" mengarakan bahwa:

> "Gerakan separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (suatu negara lain) (Larson, 2001:21)."

Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya *Konflik Kekerasaan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik* mengatakan bahwa :

> "Konsep Separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan. Hal

> tersebut lah yang membuat konsep ini terlahir sebagai wujud dari penentangan terhadap pemerintah (Dewi,1998 : 210)."

Sedangkan menurut George Larson , dalam buku *"Penumpasan Pemberontak Separatisme Di Indonesia"* mengatakan :

> "Bahwa konsep separatisme muncul akibat adanya suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Sehingga membentuk suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius (Lardon, 1991 : 20)."

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diperlukan kerangka pemikiran agar dapat melihat sejauh mana penelitian dapat tergambar terutama yang berkaitan dengan variabel data penelitian dan dengan penerapan konsep yang diangkat dengan teori yang memiliki hubungan dengan judul penelitian sehingga diangkat menjadi masalah dalam penelitian. Dalam kajian hubungan internasional mengkaji tentang peranan sebuah negara melakukan politik luar negerinya untuk menjaga kedaulatan wilayah, negara menjalankan perannya dalam organisasi internasional, dan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk peneliti dalam mengkajinya.

Setiap Negara yang berdaulat memiliki hubungannya dengan dunia internasional, baik dengan Negara maupun komunitas intenasional lainnya. Hubungan tersebut nerupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam

negeri dan perubahan situasi internasional. Dalam interaksi hubungan internasional konflik dan kompetisi merupakan hal-hal yang tidak bisa di hindari baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berdasarkan pendekatan geostrategi *concentric circle* yang menetapkan urutan prioritas kawasan dalam melaksanakan politik luar negerinya, kawasan melanesian yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia bahkan beberapa provinsi diwilayah bagian timur memiliki kesamaan etnis melanesia, sudah semestinya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pasifik selatan dipandang sebagai *sphere of primary strategic interest* baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Hal ini justru mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan tersebut menjadi modal utama counter gerakan separatism papua dan kampanye simpatisan mereka di beberapa negara dalam forum *Melanesian Spearhead Group (MSG).*

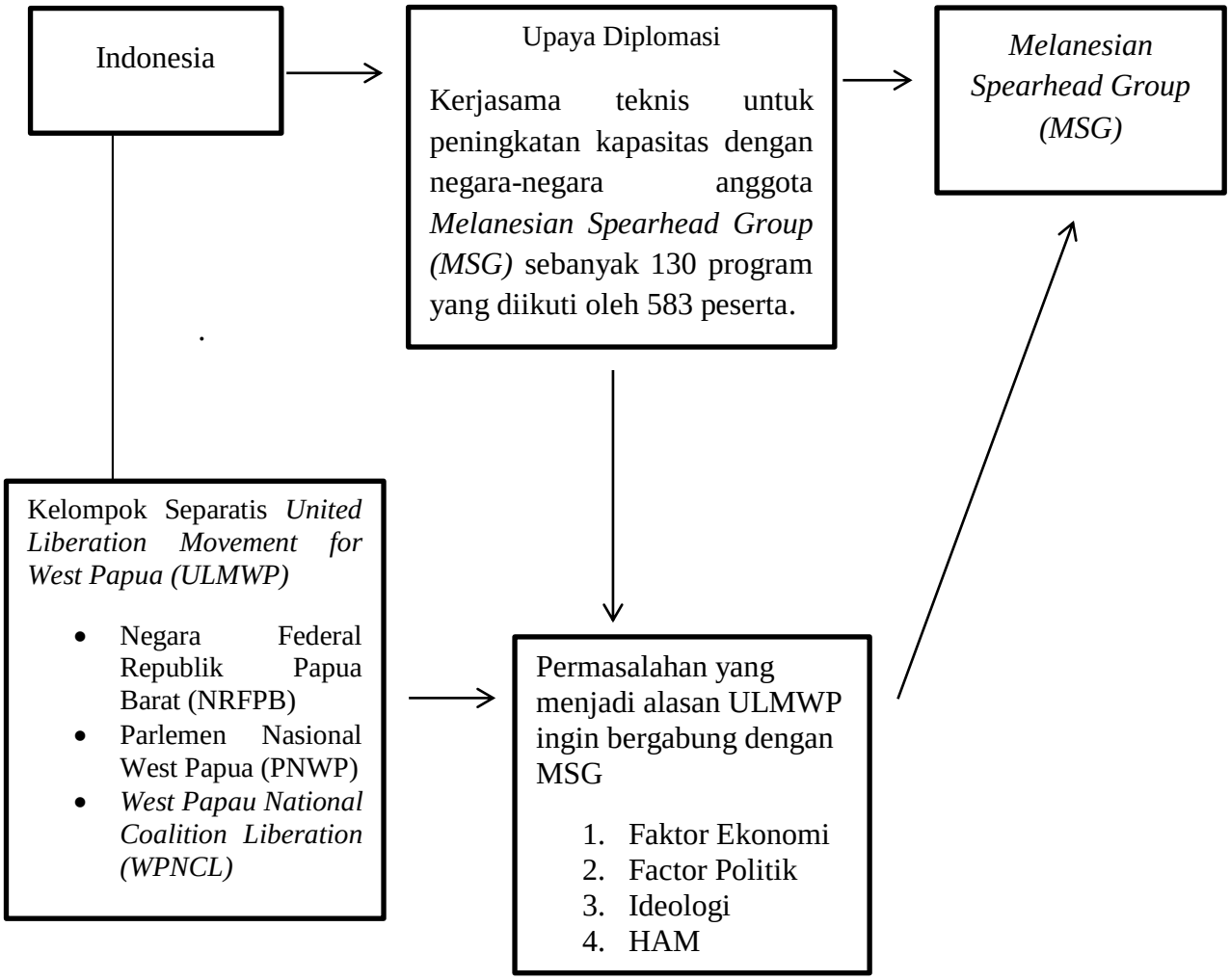
Maka dari itu pada tahun 2011 pada KTT MSG yang ke 18 Indonesia mengambil kebijakan politik luar negerinya dengan cara yang signifikan melalui jalur diplomasi untuk menghentikan dinamika tentang Papua, untuk pertama kalinya indonesia diterima sebagai observer, mengingat kedekatan geografis yang berdekatan dengan kawasan pasifik selatan, lima provinsi yang ada di bagian timur Indonesia juga merupakan bagian dari ras melanesia. Diplomasi yang dilakukan Indonesia yaitu melalui menjadi negara pengamat *(observer)* kemudian disusul lagi Indonesia mempromosikan kerjasama dengan Negara - negara

Anggota Melanesia, Indonesia membangun kerjasama teknis di berbagai bidang, seperti di bidang perikanan, produksi kerajinan, seni budaya, dan diplomasi.

Pada bulan Mei 2015, Indonesia melakukan kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)* sebanyak 130 program yang diikuti oleh 583 peserta. Selain itu juga pada KTT MSG ke-20 di Haniora, Kepulauan Salomon, yang diselengarakan pada 24-25 Juni 2015 status indonesia yang sebelumnya menjadi pengamat *(observer)* meningkat menjadi anggota asosiasi. Disela-sela pertemuan tersebut Wamenlu Fachir juga mengadakan berbagai pertemuan bilateral, antara lain dengan Perdana Menteri dan Menlu Fiji, Perdana Menteri dan Menlu Papua Nugini, Menlu Kepulauan Solomon, serta pejabat dari Vanuatu. Pertemuan-pertemuan bilateral tersebut dilakukan sebagai upaya pendekatan konkret terkait implementasi kerja sama dalam konteks Organisasi *Melanesian Spearhead Group (MSG)* ke depan

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan bersama dalam politik luar negerinya dalam MSG untuk menghentikan dinamika tentang Papua, meskipun tidak secara langsung belum terselesaikan tetapi ada tindakan dari Indonesia dalam mencegah ULMWP menjadi anggota tetap *Melanesain Spearhead Group (MSG)*. Dan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia bisa memperoleh dukungan dari beberapa negara MSG, sehingga status keanggotaan gerakan separatis *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* masih menjadi pertimbangan. Dukungan terhadap Indonesia yaitu dengan melakukan kerja sama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG sebanyak 130 program yang diikuti oleh

583 peserta. Selain itu juga pada KTT MSG ke-20 di Haniora, Kepulauan Salomon, yang diselengarakan pada 24-25 Juni 2015 status indonesia yang sebelumnya menjadi pengamat *(observer)* meningkat menjadi anggota asosiasi. secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran